

STRATEGI PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Muhammad Okto Adhitama, Diana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email : moktoa@yahoo.co.id; arsysuryono@gmail.com

Abstract: *This research was conducted in order to determine how the asset management strategies of regional owned goods and its impending factors of asset management strategies of regional owned goods in Improving Public Services at Karangploso District Office in Malang Regency. of this study shows that strategies used to manage asset of regional owned goods in improving public services was still not optimal, Insufficient facilities and infrastructure in providing services to the community, Official's ability in managing asset/regional owned goods should be improved, Insufficient fund in managing and maintaining goods. Asset Management Strategy/Regional Owned Goods in Improving Public Services consist of several strategies such as, Long term goals and objectives which consists of Planning/Budgeting regarding Demands of Asset/Regional Goods, Improve Public Services, How to act in managing asset/regional owned goods which is by Use of Asset/Regional Owned Goods, Asset/Regional Owned Goods Utilization, Resources allocation which covers Procurement of Assets/Regional Owned Goods, Inventory of Assets/Regional Owned Goods, and Impeding Factors of strategy used in managing assets/regional owned goods such as facilities for public services.*

Keywords: *Strategy, Management Owned Goods, Public Services*

Abstrak: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah serta faktor Penghambat dari strategi pengelolaan aset barang milik daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik dikantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam mengelola aset barang milik daerah dalam meningkatkan pelayanan publik masih di katakan belum optimal, karena Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kemampuan aparat dalam mengelola aset/barang milik daerah perlu ditingkatkan, Dana dalam mengelola dan merawat barang kurang mendukung. Strategi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Terdapat beberapa strategi yakni Adanya Tujuan Dan Sasaran Jangka Panjang yang terdiri dari, Perencanaan /Penganggaran Kebutuhan Aset/Barang Milik Daerah, Meningkatkan Pelayanan Publik, Cara Bertindak dalam mengelola aset/barang milik daerah yakni, Penggunaan Aset/Barang Milik Daerah, Bentuk Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah, Alokasi Suberdaya meliputi, Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah, Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah. serta Faktor Penghambat dari Strategi yang digunakan dalam mengelola aset/Barang Milik Daerah yang perlu diperbaiki Sehingga Aset/Barang Milik Daerah yang dimaksud Sarana dan Prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, PelayananPublik

PENDAHULUAN

Salah satu upaya dari terlaksana nya pelayanan yang efektif dan efisien yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Termasuk barang, alat yang akan digunakan sebagai fasilitas pelayanan . Organisasi ini memiliki sarana prasarana yang baik sehingga setiap pelayanan terlaksana sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. sebagian besar fasilitas barang yang dimiliki oleh kantor kecamatan sebagai penunjang pelayanan merupakan barang milik daerah. Barang milik daerah yang di maksud yakni barang atau fasilitas yang pengadaannya dari Anggaran Belanja Daerah(ABD).

Barang milik daerah ini harus dikelola dengan baik dan sesuai fungsinya. Pengelolaan barang milik daerah harus di atur dan di tangani sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku. Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penentu dari kinerja organisasi sehingga dibutuhkan adanya strategi pengelolaan yang optimal dalam Perencanaan, inventarisasi, identifikasi, pengamanan dan pemeliharaan. Adanya pengelolaan aset barang milik daerah mampu mendorong tujuan dari individu dan organisasi.

Setiap jenis barang atau aset umumnya melebihi satu unit seperti kendaraan untuk operasional pemerintahan lebih dari satu unit, kemudian peralatan dan mesin sebagai sarana dan prasarana mendukung pelayanan melebihi satu unit. Oleh karena banyaknya fungsi dan jumlah aset/barang yang dimiliki, untuk menentukan penggunaan dan pemanfaatan berbagai macam kepentingan sebagai penyelenggara kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset/Barang Milik Daerah yang dimaksud berupa bangunan (gedung), dan jaringan, mesin dan peralatan, kendaraan, mebelir, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Dari penjelasan diatas maka apa saja strategi yg digunakan kecamatan dalam mengelola barang milik daerah serta Faktor penghambat dari strategi yang digunakan. Beberapa Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung yakni Teori Strategi, Teori Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Teori Pelayanan Publik.

Adanya Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengemukakan bahwa penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam pengelolaan seperti, mengamankan, memelihara, serta menggunakan barang milik daerah yang sesuai dengan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dimana asset/barang milik daerah merupakan salah satu indikator penting, dalam penyelenggara pelayanan publik. maka dari itu salah satu upaya yang harus dilakukan oleh aparatur penyelenggara pelayanan yakni meningkatkan pengelolaan aset daerah, untuk melihat kondisi aset dan keamanan aset. Kajian mengenai Aset Barang Milik Daerah sudah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Pembahasan Aset Barang Milik Daerah pada kajian ini berisikan fungsi penting Aset Barang Milik Daerah dalam mendukung kegiatan organisasi serta strategi mengelola aset barang milik daerah dalam penyelenggara pelayanan.

Peralatan dan mesin adalah aset barang milik daerah yang sangat terkait dengan operasional internal pemerintah, baik untuk operasional pemerintah atau pemerintah daerah namun dalam pengelolaannya sebelum adanya paket undang-undang tentang Pengelolaan aset barang milik daerah penggunaan peralatan dan mesin belum dirasakan pentingnya, karena masih menggunakan catatan atau manual, dengan banyaknya penduduk pemerintah daerah sangat sulit mencatatnya karena kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat dengan bermacam-macam kebutuhan pelayanan maka kebutuhan sebagai pendukung pelayanan sangat amat dibutuhkan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Kualitatif, dan analisis data primer dan data sekunder dalam bentuk kalimat. Penelitian di dilakukan di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Dengan sample yang digunakan yakni *purposive sampling* dan sampel sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, Observasi dan dokumentasi. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari kantor berupa data inventarisasi aset, catatan –catatan dan data dokumen pinjam pakai, teknik analisa data adalah dengan cara reduksi data dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dipilih mana yang dianggap sesuai dengan kebutuhan peneliti, kemudian peneliti sajikan dalam penyajian

data, selanjutnya dari penyajian data dari beberapa hasil wawancara dan dilakukan penarikan kesimpulan, dan keabsahan data yakni menyamakan hasil Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Strategi yang di gunakan pada pengeloan aset barang milik daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan adanya tertib administrasi Barang Milik Daerah serta Tujuan dari pengeloan barang milik daerah ini untuk memvaliditas data barang milik daerah, dengan menyesuaikan data barang milik daerah di kecamatan. Strategi pertama Adanya penertiban administrasi mempermudah bagian aset merinci barang mana yang butuh penanganan khusus seperti pemeliharaan serta perlunya pengadaan lagi barang yang kurang dan atau dananya disesuaikan dengan kebutuhan barang milik daerah sehingga sarana, prasarananya sebagai kelengkapan penunjang pelayanan bisa dipergunakan dalam keadaan siap pakai. Upaya dari terlaksana nya pelayanan yang efektif dan efisien yaitu sarana dan prasarana yang memadai.

Termasuk barang, alat yang akan digunakan sebagai fasilitas pelayanan . Organisasi ini memiliki sarana prasarana yang baik sehingga setiap pelayanan terlaksana sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. sebagian besar fasilitas barang yang dimiliki oleh kantor kecamatan sebagai penunjang pelayanan merupakan barang milik daerah. Barang milik daerah yang di maksud yakni barang atau fasilitas yang pengadaannya dari Anggaran Belanja Daerah(ABD).

Strategi kedua dalam mengelolaa asset barang milik daerah yakni cara bertindak bahwa dalam menindak lanjuti tindakan yang sudah ada sebelumnya dengan adanya pelatihan yang dilakukan setiap 2 bulan sekali yang diadakan di kabupaten yakni pada BPKAD dan pelatihan diadakan 6 bulan sekali dikecamatan yang diselenggarakan untuk seluruh aparatur yang ada dikecamatan. serta penambahan sarana prasarana asset daerah sebagai penunjang peningkatan pelayanan publik.

Strategi ketiga yang di gunakan yakni alokasi sumber daya. Dengan adanya dana yang sesuai dengan kebutuhan barang kemudian kemampuan aparatur dalam mengelola dan pelayanan publik perlu dilaksanakan secara maksimal. Kemampuan petugas yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas pengelolaan asset barang milik daerah serta pengguna dalam mengelola dan menggunakan sarana dan prasarana. Strategi keempat kebutuhan barang milik daerah keberadaanya, didasarkan kebutuhan akan kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat dikarenakan kebutuhan setiap organisasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelayanan serta standart harga barang dan standart barang. ketersediaan barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah (BMD) pada organisasi (SKPD) sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Strategi kelima pengadaan barang dilakukan secara transparan, pengadaan aset/barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang pada dasarnya berawal dari rencana dan kebutuhan barang dan rencana anggaran oleh bagian Aset/ Barang Milik Daerah (BMD) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengadaan barang juga disesuaikan dengan kebutuhan barang dari organisasi, dimana kebutuhan inventaris kantor sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Pengadaan Asset dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang pada dasarnya berawal dari rencana kebutuhan pelayanan publik. Strategi keenam Penggunaan barang disesuaikan dengan fungsinya di kecamatan yakni sebagai penyedia pelayanan. penggunaan barang untuk kelangsungan pelayanan publik. proses penggunaan barang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan pengguna.

Strategi Ketujuh Bentuk Pemanfaatan yang dilaksanakan oleh kantor Kecamatan selain sebagai pelayanan kepada masyarakat Kecamatan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk pemanfaatan pinjam pakai namun biaya pemeliharaannya dibebankan kepada peminjam dengan

adanya tanda terima peminjaman. pemanfaatan barang menggunakan permohonan pinjam pakai kepada kantor melalui bagian aset/barang milik daerah pada kec. Karangploso. bentuk pemanfaatan pinjam pakai ini seharusnya memperoleh nilai ekonomi, dari hasil bentuk pemanfaatan pinjam pakai ini kecamatan memperoleh anggaran yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan yang dipergunakan sebagai keperluan penyelenggara pelayanan kecamatan.

Strategi kedelapan inventarisasi aset/barang milik daerah untuk melakukan pengecekan catatan data administratif Barang Milik Daerah (BMD) dengan kondisi fisik Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten dengan Kec. Karangploso yang digunakan sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat, inventarisasi barang dilakukan agar merincikan data barang dengan kondisi fisik barang. dimana barang secara fisik perlu perbaikan atau butuh pemeliharaan, dengan kata lain barang mengalami perubahan secara fisik sehingga tidak memungkinkan untuk di pergunakan lagi sebagai penunjang pelayanan. adanya inventarisasi yaitu membantu penyelenggara kebutuhan barang merinci data barang dan kondisi fisik barang.

Strategi kesembilan Meningkatkan Pelayanan Publik. Adanya kelengkapan sarana dan prasarana, dimana sarana dan prasarana tersebut yang ada dikecamatan sebagian besar merupakan barang milik daerah. Pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa dan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan ketersediaan sarana dan prasarana yakni peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peralatan dan mesin adalah aset barang milik daerah yang sangat terkait dengan operasional internal pemerintah, baik untuk operasional pemerintah atau pemerintah daerah namun dalam pengelolaannya sebelum adanya paket undang-undang tentang Pengelolaan aset barang milik daerah penggunaan peralatan dan mesin belum dirasakan pentingnya, karena masih menggunakan catatan atau manual, dengan banyaknya penduduk pemerintah daerah sangat sulit mencatatnya karena kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat dengan bermacam-macam kebutuhan pelayanan maka kebutuhan sebagai pendukung pelayanan sangat amat dibutuhkan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya pelayanan.

Pengelolaan barang milik daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan aset barang milik daerah di jelaskan bahwa aset daerah merupakan semua harta kekayaan milik daerah baik barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau perolehan lainnya yang sah dalam hal ini misalnya (hibah, dan lain-lain) yang digunakan untuk penyelenggara kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset barang milik daerah yang dimaksud berupa Tanah, Jalan, bangunan, instalasi, dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan mebelir, dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Faktor Penghambat Strategi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.

Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya, dengan potensi konflik kepentingan. Banyak permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Aset Barang Milik Daerah yakni perawatan, pemanfaatan, penggunaan, Perencanaan, pengadaan, penggunaan, bentuk pemanfaatan. Tujuan Dan Sasaran Jangka Panjang, Dalam meningkatkan pelayanan publik memiliki faktor penghambat dalam strategi pengelolaannya yaitu kurangnya pemeliharaan atas sarana atau barang yang di gunakan sehingga pada saat penggunaan sarana tersebut tidak berfungsi dengan maksimal serta penggunaan barang dikantor

kecamatan harus dapat perawatan atau pemeliharaan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai Tujuan dari organisasi. tertibnya administrasi barang milik daerah belum maksimal dikarenakan kemampuan petugas dalam mengelola barang masih kurang, serta sasaran dari pengelolaan validitas data barang dengan kondisi fisiknya tidak sesuai, itu dikarenakan perawatannya yang kurang maksimal sehingga membutuhkan dana untuk penambahan barang dan prasarana barang milik daerah.

Cara Bertindak, Pemilihan tindakan saat ini masih belum semuanya berjalan sesuai dengan yang di inginkan karena barang milik daerah masih dirinci secara manual kondisi fisik barang dengan data yang ada di daftar barang atau aset barang milik daerah. tindak lanjut dari pengelolaan sebelumnya belum berjalan optimal.

Alokasi Sumberdaya, perlunya peningkatan dalam sumber dana pengadaan dan juga pengembang sumber daya aparatur perlu diadakan pelatihan sesering mungkin untuk menambah wawasan juga meningkatkan sumber daya dari aparatur itu sendiri.

- a) Sumber daya aparatur masih dalam proses pengembangan
- b) Sumber dana yang digunakan dalam proses perbaikan dan belum begitu optimal

Perencanaan/Penganggaran Kebutuhan Barang, faktor penghambat dari perencanaan kebutuhan barang yakni saat harus merincikan barang-barang yang lalu dengan yang akan direncanakan kebutuhannya yang akan datang. Kebutuhan barang harus disesuaikan fungsi sebagaimana mestinya sebab semua barang akan dilaporkan hasil penggunaannya di setiap akhir tahun, untuk memperoleh bukti fisik dari penggunaan aset/barang milik daerah dengan Perencanaan kebutuhan barang/aset pada kec.karangploso. sedang dalam perencanaan kebutuhan barang masih sulit dialami dikarenakan semua proses dalam perencanaan kebutuhan barang masi dalam keadaan manual perinciannya dilakukan satu persatu untuk memperoleh jumlah barang yang sesuai dengan keberadaan fisiknya.

Pengadaan Aset, Faktor Penghambat pengelolaannya masih secara manual, sedangkan sulit untuk bagian aset dalam merinci data barang satu persatu kemudian di print kemudian diantar lagi kekabupaten, faktor penghambatnya bagian aset Input secara Manual menginginkan input melalui website, jadi tidak perlu bolak balik kecamatan ke kabupaten lagi. sehingga waktu yang ada tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sistem manajemen aset sangat diperlukan dalam pengelolaan aset dikarenakan dapat mempermudah, serta transparan dalam menginput data aset barang milik daerah di perguruan kecamatan Karangploso.

Penggunaan Aset/ Barang milik daerah, Penggunaanya masih belum digunakan sesuai fungsi penggunaanya seperti aturan yang diberlakukan oleh kabupaten sebagai pemberi sarana yang diberikan oleh pemerintah daerah. faktor penghambat dari penggunaan barang masih ada ketidak sesuaian dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan pelayanan yang mungkin membutuhkan waktu cepat seharusnya sarana dan prasarana dipergunakan sebagaimana fungsinya. penggunaan aset harusnya dapat difungsikan sebaik mungkin agar proses pelayanan dapat berjalan baik, namun dalam pelaksanaannya aparatur masih belum menjalankan sepenuhnya tugas dan fungsi mereka.

Bentuk Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah pengguna barang tidak memanfaatkan barang yang dipinjamkan dengan baik dan tanggung jawab, padahal perjanjian pinjaman sudah ada secara tertulis. masih saja ada barang yang lecet saat di pinjam, dikembalikan tidak memberitahu, melainkan menyembunyikan kerusakan tersebut oleh peminjam. karena kadang aparatur pemerintah sudah percaya jadi tidak lagi memeriksanya. pemahaman akan pemanfaatan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan tanggung jawab Pengguna. Pemanfaatan pinjam pakai ini diberikan agar masyarakat juga dapat memanfaatkan fasilitas daerah yang ada dikecamatan.

Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah, faktor penghambat pada inventarisasi secara manual yang masih belum menggunakan sistem E-BMD. Barang milik daerah ini harus dikelola dengan baik dan sesuai fungsinya. Pengelolaan barang milik daerah harus di atur dan di tangani sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku. Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penentu dari kinerja organisasi sehingga dibutuhkan adanya strategi pengelolaan yang optimal dalam Perencanaan, inventarisasi, identifikasi, pengamanan dan pemeliharaan. Adanya pengelolaan aset barang milik daerah mampu mendorong tujuan dari individu dan organisasi. adanya inventarisasi aset ini bertujuan mengetahui kondisi fisik barang, yang membutuhkan pemeliharaan dan harus diganti dikarekan dapat tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam pelayanan publik.

Meningkatkan Pelayanan Publik Dengan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah, Kelengkapan Sarana Prasarana dalam pelayanan publik merupakan indikator penting, Faktor Penghambat dari strategi pengelolaan aset ini yaitu kelengkapan sarana dan prasarana masih kurang memadai. dimana seharusnya kelengkapan sarana sangat berpengaruh terhadap penyelenggara pelayanan sebagai pendukung pelayanan publik. Peralatan dan mesin adalah aset barang milik daerah yang sangat terkait dengan operasional internal pemerintah, baik untuk operasional pemerintah atau pemerintah daerah namun dalam pengelolaannya sebelum adanya paket undang-undang tentang Pengelolaan aset barang milik daerah penggunaan peralatan dan mesin belum dirasakan pentingnya, karena masih menggunakan catatan atau manual, dengan banyaknya penduduk pemerintah daerah sangat sulit mencatatnya karena kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat dengan bermacam-macam kebutuhan pelayanan maka kebutuhan sebagai pendukung pelayanan sangat amat dibutuhkan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya pelayanan. dapat kita lihat budaya kepatuhan dimana tindakan, perilaku yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah memastikan bahwa sistem dan prosedur serta kegiatan pengadaan asset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah. Sehingga Pengadaan barang dan jasa bagian asset sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016.

KESIMPULAN

1. Penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Terdapat beberapa strategi yakni Adanya: Tujuan Dan Sasaran Jangka Panjang yang terdiri dari, Perencanaan /Penganggaran Kebutuhan Aset/Barang Milik Daerah, Meningkatkan Pelayanan Publik, Cara Bertindak dalam mengelola aset/barang milik daerah yakni, Penggunaan Aset/Barang Milik Daerah, Bentuk Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah, Alokasi Suberdaya meliputi, Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah, Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah.
2. Faktor penghambat Dari strategi pengelolaan aset/barang milik daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, masih di katakan belum optimal, karena sebagai berikut : Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kemampuan aparat dalam mengelola aset/barang milik daerah perlu ditingkatkan, Dana dalam mengelola dan merawat barang kurang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Sedarmayanti, 2016, *Manajemen Strategis cetakan kedua*, Refika Aditama. Jakarta
- Mukarom Dan Laksana, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung. CV. Pustaka Setia

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

M.Yusuf, S.Sos., M.Si, 2011. *Delapan Langkah Pengelolaan Asset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta. Salemba Empat.